

Tekan Silpa, Perencanaan Harus Lebih Realistis

Denpasar (Bali Post) -

Realisasi APBD 2015 telah disampaikan Wali Kota Denpasar dalam sidang paripurna, beberapa waktu lalu. Realisasi tersebut mendapat tanggapan yang beragam dari jajaran DPRD Denpasar. Salah satu yang mendapat sorotan, yakni tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) pada tahun lalu yakni mencapai Rp 243,70 miliar lebih.

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar A.A. Gede Oka Mahendra, Minggu (24/7) kemarin mengungkapkan, dari laporan yang disampaikan tersebut menunjukkan masih ada yang perlu ditingkatkan pada tahun ini. Misalnya saja soal Silpa yang masih tinggi, perlu dicermati dengan baik agar ke depan tidak muncul lagi Silpa yang besar. Terlebih, masih banyak yang perlu dana untuk kegiatan lainnya. Karena itu, Mahendra meminta pihak eksekutif agar lebih realistis dalam merancang perencanaan yang dibuat.

Silpa yang tinggi bukan saja terjadi akibat penghematan yang dilakukan oleh SKPD. Mengurangi Silpa, katanya, harus dimulai dari perencanaan pembangunan yang lebih baik. Selain itu, sistem

perencanaan anggaran juga harus dibuat serealistis mungkin sehingga bisa terserap dengan baik.

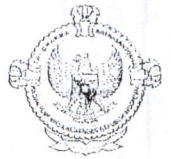
Ia mencontohkan, belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp 2,3 triliun. Ternyata, realisasinya hanya Rp 1,7 triliun atau hanya 86,36 persen. "Saya melihat ini bukan akibat dari penghematan semata. Ini akibat perencanaan yang kurang bagus," kritiknya.

Hal senada disampaikan A.A. Gede Putra Ariewangsa dari Fraksi Demokrat. Silpa yang tinggi tahun lalu patut disayangkan, karena sejatinya masih banyak yang perlu diberikan dana. Misalnya infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan. "Memang ini bukan sepenuhnya kesalahan eksekutif, ini akibat kurang cermatnya semua pihak dalam pembahasan APBD 2015," ujar politisi asal Sanur ini.

Sebelumnya, Wali Kota Rai Mantra di hadapan sidang paripurna beberapa waktu lalu, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015 Kota Denpasar. Pada pendapatan daerah, Wali

Kota Rai Mantra merencanakan Rp 1,8 triliun lebih. Namun yang berhasil direalisasikan Rp 1,7 triliun. Demikian pula untuk belanja daerah, dirancang Rp 2,03 triliun lebih, realisasinya hanya Rp 1,75 triliun. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) yang dirancang Rp 724,49 miliar lebih, berhasil melampaui target 7,14 persen, yakni Rp 776,21 miliar.

Sementara untuk APBD Perubahan 2016 ini, Wali Kota merancang pendapatan daerah Rp 2,05 triliun, meningkat Rp 38,70 miliar dibandingkan pada APBD Induk. Pendapatan daerah ini meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DAK, DAU, dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak), serta lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan untuk belanja tidak langsung, Wali Kota merancang Rp 1,26 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 1 triliun lebih. Ini artinya, APBD Perubahan 2016 dirancang defisit Rp 216,94 miliar. Defisit ini akan ditutupi dengan pembiayaan daerah yang dirancang Rp 216,94 lebih yang diperoleh dari Silpa 2015 lalu. (kmb12)



Tahun Ini, Pencairan Dana Desa Dua Tahap

Denpasar (Bali Post) -

Proses pencairan dana desa yang dilakukan Pemkot Denpasar kini mengalami perubahan dari tahun lalu. Bila sebelumnya dicairkan dalam tiga tahap atau periode, kini hanya dua kali saja. Untuk tahap pertama, pencairannya sekitar bulan April-Mei 2016. Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan Agustus 2016 mendatang.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Denpasar I Made Mertajaya didampingi Kabag Keuangan Setda Kota Denpasar Made Widra, belum lama ini mengatakan, pihaknya sudah mencairkan dana desa tahap pertama. Sekitar Rp 12 miliar dana telah disalurkan kepada masing-masing desa. Besarannya tidak sama, sesuai dengan karakteristik desa. Misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, serta yang lainnya. "Mekanismenya sudah ada," ujar Mertajaya.

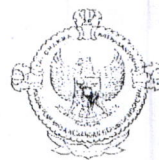
Dikatakannya, pencairan dana desa tahun ini sedikit berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu dicairkan sebanyak tiga kali, kini hanya dua kali. Besarannya, tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen.

Sementara itu, serapan dana desa pada 2015 lalu dinilai masih rendah yakni hanya 57 persen atau Rp 74 miliar lebih dari anggaran sebesar Rp 130 miliar. Hal ini sangat disayangkan Fraksi Demokrat DPRD Denpasar dalam pandangan umumnya yang dibacakan A.A. Gede Putra Ariewangsa, S.Sos. dalam sidang paripurna, belum lama ini. Mengingat, program lainnya masih memerlukan anggaran yang cukup besar, sementara dana desa justru menyisakan anggaran.

Dalam rapat kerja antara Badan Anggaran DPRD dengan tim APBD, Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar Made Widra tidak membantah kondisi itu. Hanya, posting dana desa sebesar itu memang harus dilakukan sesuai amanat undang-undang. "Kita memang harus menganggarkan sesuai ketentuan undang-undang, karena jika tidak, pusat akan memotong sejumlah yang semestinya kita anggar. Terkait sisa anggaran, itu merupakan laporan APBDes yang ada di rekening desa, bukan di rekening dalam APBD kita," terangnya. (kmb12)

Edisi : Senin, 25 Juli 2016

Hal : 2



Putusan Kasasi

Kasus PDAM Gianyar Misterius

Denpasar (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi PDAM Gianyar, beberapa kali mengemuka adanya sisi *nyeleleh*. Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Denpasar sempat tidak mengirim kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar ke Mahkamah Agung (MA). Kini setelah putusan kasasinya keluar, juga bikin gempar. Pasalnya, Kejari Gianyar yang bakal melakukan eksekusi justru terkesan dipingpong dan salinan putusannya misterius karena tidak diketahui keberadaannya.

"Saya cek ke PN Denpasar, oleh Pak Rudi dikatakan sudah dikirim melalui pengadilan di Gianyar. Begitu saya cek ke PN Gianyar, pihak pengadilan mengaku belum menerima surat. Ah gawat ini, ada apa kok bisa seperti ini? Apakah mesti saya bersurat lagi seperti dulu," ucap Kasipidsus Kejari Gianyar Herdian Rahardi, akhir pekan kemarin.

Atas kondisi itu, dia tidak serta merta menyalahkan pihak terdakwa, apalagi mereka sangat kooperatif selama ini. "Wajar saja

mereka tidak mau dilakukan eksekusi jika mereka belum terima salinan putusan. Persoalannya, kami sendiri sudah terima salinan putusan dari MA via kantor pos. Tetapi secara prosedural, kan pengadilan yang menerima salinan itu menyampaikan ke kami dan terdakwa," ucap Herdian Rahardi menyikapi misteriusnya salinan putusan tersebut.

Sebagai pihak eksekutor, JPU masih tetap menunggu hingga Senin ini dan bakal kembali mengecek ke Pengadilan Gianyar.

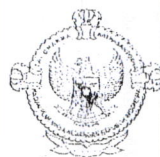
Mesti terkesan dipingpong, dia mengaku selalu berkoordinasi dengan pihak terdakwa. Bahkan terkait putusan korupsi PDAM Gianyar untuk Dewa Putu Djati (mantan Direktur Utama), Dewa Putra (Direktur Umum), dan I Nyoman Nuka (Direktur Teknik), kata Herdian, mereka juga siap datang Senin ini tanpa dipanggil melalui surat resmi.

Dalam putusan MA tersebut, menganulir putusan Pengadilan Tipikor Denpasar yang membebaskan ketiga terdakwa dan

menjatuhkan hukuman 5 tahun untuk Dewa Putu Djati serta vonis 4 tahun untuk Dewa Putra dan Nyoman Nuka. Seperti pernah diberitakan, setelah ketiga terdakwa yaitu Dewa Putu Djati, Dewa Putra dan I Nyoman Nuka divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Denpasar pada Januari 2014 lalu (meskipun ada hakim berpendapat *beda/dissenting opinion*), Kejari Gianyar langsung melayangkan kasasi melalui PN Denpasar.

Namun, hampir satu tahun kasasi yang diajukan itu tanpa kejelasan. Kejari Gianyar pun lalu mempertanyakan memori kasasi yang sudah diajukan ke MA pada awal 2015 lalu. Setelah bersurat, barulah diketahui jika memori kasasi tersebut tidak pernah sampai ke MA karena belum dikirim alias nyangkut di

PN Denpasar. Akhirnya, pada Agustus 2015 lalu Kejari Gianyar mengirimkan ulang memori kasasi. MA merespons kasasi itu, dan kasus korupsi kegiatan perencanaan teknis pengadaan jasa konsultasi pembuatan *detail engineering design* (DED) di PDAM Gianyar dinyatakan terbukti bersalah. Putusan PN Denpasar pun dianulir sehingga para terdakwa yang sempat bebas kini siap-siap harus masuk penjara kembali. (kmb37)



Pascapenundaan Pengalihan Wewenang Disdik Siapkan Anggaran Pembiayaan SMA/SMK

Singaraja (Bali Post) -

Pascapenundaan pengalihan wewenang pengelolaan SMA/SMK ke provinsi, Dinas Pendidikan (Disdik) Buleleng hingga kini belum menerima secara resmi keputusan tersebut. Namun, Disdik telah menyusun program kerja, termasuk menyiapkan anggaran pembiayaan sekolah. Terkait guru atau pegawai tata usaha yang telah diverifikasi, statusnya tetap di kabupaten. Hanya saja pembayaran gaji mereka masih menunggu, karena anggarannya belum dialokasikan dalam APBD.

Kadisdik Kabupaten Buleleng Gede Suyasa akhir pekan lalu mengatakan, pembatalan pengelolaan SMA/SMK oleh pemprov baru diketahui dari informasi yang beredar di media massa. Pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat maupun Pemprov Bali. Sambil menunggu, Disdik melakukan penyusunan program, kegiatan dan penyiapan anggaran dalam APBD Buleleng. Hal ini dilakukan, mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI No. 31 Tahun 2016. Regulasi ini mengamanatkan bahwa sebelum daerah memiliki perangkat organisasi baru, maka penyusunan perencanaan pendidikan menengah menjadi kewenangan di kabupaten. Sejauh ini Disdik telah melakukan konsultasi bersama-sama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya untuk melakukan penyiapan program, kegiatan dan alokasi anggaran.

"Mengacu regulasi yang ada dan hasil konsultasi ke Kemendagri untuk perencanaan program, kegiatan dan anggaran tetap dibebankan pemerintah kabupaten," katanya.

Menurut Suyasa, sejak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengambilalihan pengelolaan SMA/



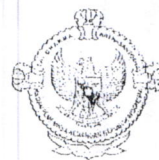
Bali Post/kmb38

Gede Suyasa

SMK mulai tahun ajaran 2016/2017, Disdik tidak lagi menyusun program kegiatan, termasuk anggaran dalam APBD. Bahkan waktu itu, setelah diambilalih provinsi anggaran yang selama ini disiapkan akan dialihkan untuk membiayai program pada jenjang pendidikan SMP atau SD. Namun pembatalan pengelolaan sesuai keputusan MK, memaksa Disdik kini menyusun program kegiatan dan kebutuhan anggaran dalam bentuk RKPD Pendidikan yang dikelola di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng. Langkah ini ditempuh sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Terkait status guru atau pegawai tata usaha, menurut Suyasa administrasi termasuk data-data peting lain menyangkut guru dan pegawai ini sudah diusulkan sesuai petunjuk dari pemprov. Untuk sementara, status guru dan pegawai ini tetap berada di kabupaten, hanya saja untuk keperluan gaji atau tunjangan itu menunggu proses anggaran di daerah.

Ketua Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Buleleng Gusti Ngurah Agung mengatakan, terlepas dari pembatalan tersebut, baik provinsi dan kabupaten segera mengambil langkah agar tidak mengganggu proses belajar mengajar (PBM) di SMA/SMK. Apalagi pembatalan ini berbarengan dengan tahun ajaran baru 2016/2017, sehingga sekolah yang memerlukan pembiayaan begitu besar ini tidak mengalami hambatan serius. Kepala sekolah, guru dan pegawai diharapkan tidak perlu resah dengan keputusan tersebut. Semua unsur pengelola sekolah tetap melaksanakan tugas-tugas, sehingga situasi di sekolah secara menyeluruh berjalan normal, tanpa memunculkan gejolak serius. "Perlu dikoordinasikan lagi, jangan sampai pembelajaran terganggu dan otomatis akan merugikan siswa itu sendiri," tegasnya. (kmb38)



Kasus Korupsi di PDAM

Kejari Siap Jemput Paksa Terdakwa

Gianyar (Bali Post) -

Setelah dua kali dilakukan penundaan, tiga terdakwa kasus korupsi PDAM Gianyar yakni Dewa Putu Djati (mantan Direktur Utama), Nyoman Putra (mantan Direktur Umum) dan Nyoman Nuka (mantan Direktur Teknik) dipastikan akan mulai menjalani masa penahanan hari ini (25/7). Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar mengancam akan melakukan penjemputan paksa bila terdakwa berupaya mengelak.

Kasi Intel Kejari Gianyar Ketut Sudiarta, Minggu (24/7) kemarin mengatakan, setelah dua kali diberikan izin penundaan, hari ini ketiga terdakwa wajib dieksekusi untuk menjalani vonis dari Mahkamah Agung (MA). "Ya sesuai kesepakatan kemarin, seharusnya besok (hari ini-red) ketiga terdakwa wajib datang untuk mulai menjalani vonis dari MA," tegasnya.

Disinggung, bila hari ini mereka kembali tidak hadir dengan berbagai alasan, pria asal Tegallalang ini menegaskan, bila hal itu terjadi akan dilakukan penjemputan paksa. "Seharusnya mereka bersedia datang memenuhi kesepakatan, karena Kejari sudah dua kali berbaik hati memberikan penundaan," katanya.

Ketiga terdakwa pun dijadwalkan akan datang ke Kejari Gianyar, terlebih dahulu sekitar pukul 09.00

Wita, untuk menandatangani daftar hadir. Selanjutnya mereka akan digiring ke Rutan Kelas 2 B Gianyar, guna memulai masa penahanan.

Sementara terkait laporan Nyoman Nuka yang menyeret nama pejabat di Pemkab Gianyar berinisial Gede WS, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar akan melakukan pemanggilan untuk konfirmasi laporan. Sudiarta menegaskan, pihaknya pasti akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Tentu kita akan tindaklanjuti ini. Tetapi kita dalam dulu berkas yang ada, untuk memastikan ada tidaknya unsur korupsi dari laporan tersebut," katanya.

Pihaknya juga akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor, yakni Gede WS yang saat ini tercatat sebagai pejabat eselon II di Lingkungan Pemkab Gianyar.

"Kalau pemeriksaan berkas sudah fix, tentu nanti akan ada pemanggilan terhadap terlapor sebagai bentuk konfirmasi. Tetapi kapan itu (pemanggilan-red) belum bisa ditentukan," ungkapnya.

Ketiga terdakwa kasus dugaan korupsi PDAM Gianyar didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perencanaan teknis pengadaan jasa konsultasi pembuatan *detail engineering design* (DED) di PDAM Gianyar. Akibat perbuatan para terdakwa, PDAM Gianyar dirugikan sekitar Rp 2,6 miliar. Namun dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, ketiga terdakwa diputuskan bebas sekitar bulan Agustus 2013.

Atas vonis ini, Kejari Gianyar mengajukan kasasi ke MA dan akhirnya dikabulkan. MA akhirnya menganulir putusan Pengadilan Tipikor. (kmb35)

Edisi : Senin, 25 Juli 2016

Hal : 9



ASET PEMPROV

Masuk Penataan, Warga Diminta Bongkar Bangunan ✓

NUSA PENIDA - Dua bangunan usaha milik warga Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida akan digusur oleh Pemprov Bali karena mereka membangun di atas tanah negara. Berdasarkan surat Pemprov yang ditandatangani Sekda Cok Ngurah Pelayun menyarankan warga membongkar sendiri bangunan mereka paling lambat, Sabtu (30/7) mendatang.

Surat itu juga ditembuskan kepada Bupati Klungkung dan jajarannya. Camat Nusa Penida IGA Gede Putra Mahajaya, mengakui informasi pembongkaran tersebut. "Tim dari Provinsi bersama Bagian Perlengkapan Pemda Klungkung sudah turun," ujar Mahajaya kemarin (23/7). Akan tetapi, surat yang juga ditembuskan ke Kantor Camat belum dia pegang. "Mungkin agak lambat, kan tahu bawa surat ke Nusa Penida gimana," katanya.

Mengenai adanya penggusuran dari Pemprov Bali, camat pun tidak bisa berbuat banyak. Apakah menyarankan warga yang melanggar cepat-cepat angkat kaki atau memberikan perlindungan. "Saya belum terima surat, tidak tahu isinya, supaya tidak salah," jelasnya. Setahu Mahajaya, dua bangunan itu memang berada di atas tanah aset Pemprov Bali. "Katanya akan dilakukan penataan, kan itu di pinggir pantai. Karena ditata, makanya bangunan minta dibongkar," terangnya. (dra/gup)